

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA LIANG BUAH KECAMATAN TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA

Tania Jannah

Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh

Email: taniajannah1818@gmail.com

Abstract

To analyze the management of village fund allocations to improve the economy in Liang Buah Village, Teweh Baru District, North Barito Regency. To identify obstacles and possible measures in managing Village Fund Allocations (ADD) to improve the economy. This research was conducted on 8 village officials, by conducting in-depth interviews, then presenting and concluding the problems. The main objective of ADD management is to improve community welfare but still faces obstacle. Obstacles faced include low understanding of village officials regarding financial management, delays in accountability reporting, low community participation, and less than optimal coordination with local governments. Efforts made to overcome these obstacles require increasing human resource capacity through training, strengthening transparency, and involving the community in every stage of management. Additionally, oversight by local governments needs to be improved, supported by the use of technology such as SISKEUDES to increase accountability. ADD management focus should also be directed towards community economic empowerment programs such as skill training, micro-business support, and local potential development. Cooperation from the village and private governments is an important step to develop breakthroughs that will drive the economic progress of the society without limits.

Keywords: Village Funds, Management and Economic Development

Abstrak

Untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan perekonomian di Desa Liang Buah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dapat dilakukan dalam pengelolaan ADD agar perekonomian dapat meningkat. Penelitian ini dilakukan kepada 8 orang pejabat desa, dengan melakukan wawancara secara mendalam, kemudian disajikan dan disimpulkan permasalahannya. Tujuan utama pengelolaan ADD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi masih menghadapi kendala. Kendala yang dihadapi mencakup rendahnya pemahaman aparat desa terkait tata kelola keuangan, keterlambatan dalam pelaporan pertanggung jawaban, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurang optimalnya koordinasi dengan pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penguatan transparansi, dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan. Selain itu, pengawasan dari pemerintah daerah perlu diperkuat, didukung oleh penggunaan teknologi seperti SISKEUDES untuk meningkatkan akuntabilitas. Fokus pengelolaan ADD juga harus diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pelatihan keterampilan, dukungan akan usaha mikro, dan pengembangan potensi lokal. Kerjasama dari pemerintah desa dan swasta merupakan langkah penting untuk mengembangkan terobosan yang akan mendorong kemajuan ekonomi masyarakat tanpa batas.

Kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan dan Peningkatan Perekonomian

PENDAHULUAN

Dalam tugasnya memberikan pelayanan, desa akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan dana desa, diharapkan akan tersedia aparatur pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan Undang-Undang, pemerintah akan mengalokasikan lebih banyak. Namun, strategi harus didukung oleh pengelolaan keuangan desa yang terbuka dan bertanggung jawab agar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Jumlah dana yang didapatkan desa menciptakan optimisme untuk kemajuan masa depan dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Hal ini harus dibarengi dengan norma-norma pengelolaan keuangan desa yang transparan dan tanggung jawab.

Secara umum, APBDes tidak dapat dipisah dengan ADD. Karena ADD merupakan bagian pendapatan desa. pemerintah desa wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan biasanya dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sedangkan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Masih ditemukan bahwa desa belum dapat menjalankan sesuai rencana, seperti terlambatnya penyusunan APBDes berikutnya, serta keterlambatan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian Thomas (2012) yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan ADD dan kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan ADD di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, diketahui bahwa 30% ADD dapat berjalan sesuai dengan petunjuk, namun 70% ADD berjalan kurang optimal karena lebih terfokus pada pembangunan fisik dan pengadaan barang. Tantangan dalam mengelola ADD adalah keterbatasan sumber

daya manusia, terutama perangkat desa, dan kurangnya kerja sama. Kendala terbesar adalah penyediaan perangkat desa dan sumber daya manusia desa yang belum efektif, sehingga bantuan aparatur pemerintah daerah tetap diperlukan.

Di samping data hasil penelitian sebelumnya, masih ditemukan sejumlah kesulitan dan permasalahan lain dalam pengelolaan ADD, seperti masih banyaknya dana ADD yang disalahgunakan dan dimanfaatkan sebagai ladang korupsi oleh perangkat desa. Kasus penyalahgunaan anggaran desa pernah terjadi di Desa Liang Buah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara. Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah di Kabupaten Barito Utara mulai menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Siskeudes dapat membantu bendahara desa dalam menjalankan tugasnya. Semua tahapan prosedur pengelolaan ADD akan diselesaikan secara otomatis.

Hingga kini belum ada data pasti dan transparansi mengenai pengelolaan serta belum ada penelitian terdahulu yang dilakukan di Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Pengelolaannya hanya diketahui oleh Camat dan perangkat desa yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dalam menentukan tingkat pengelolaan ADD di Kecamatan Liang Buah Kecamatan, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, dan apakah pengelolaannya sesuai dengan Permandagri yang diwajibkan. Berdasarkan penelitian pertamat dalam pengelolaan ADD, pemerintah desa menghadapi kendala dalam pengelolaan ADD, antara lain kurang perhatian maksimal terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam inisiatif yang didanai oleh ADD. Hal ini juga menunjukkan kurangnya komunikasi antar pengelola ADD dengan masyarakat yang membuat terhambat untuk menyalurkan aspirasinya. Banyaknya perangkat desa yang belum memahami alur pengelolaan keuangan khususnya ADD, serta minimnya ide-ide baru untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Permasalahan lain yang muncul dari

wawancara dengan Kepala Desa Liang Buah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara mengenai pertanggungjawaban, perangkat desa terlambat dalam hal pertanggungjawaban, contohnya pada tahun 2023 pada tahap pertama, perangkat desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Camat di bulan Oktober, seharusnya dilaporkan pada akhir bulan Juli. Keterlambatan mengakibatkan ADD untuk tahap kedua tertunda dan lambat, yang tentunya akan menghambat terwujudnya kelola pemerintah desa. Berikut Data ADD pada Desa Liang Buah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

Tabel 1
Anggaran dan Realisasi ADD
Desa Liang Buah Kecamatan Teweh Baru
Kabupaten Barito Utara

Tahun	Anggaran ADD (Rp)	Realisasi ADD (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Pemmasalahan dalam Pengelolaan ADD
2020	1.238.765.450	1.092.543.210	88,20%	Partisipasi masyarakat masih rendah dalam kegiatan ADD.
2021	1.315.987.320	1.134.654.875	86,20%	Kurangnya komunikasi antara organisasi pengelola ADD dengan masyarakat.
2022	1.372.823.899	1.198.432.567	87,30%	Banyak aparatur desa yang belum memahami alur pengelolaan ADD.
2023	1.427.654.322	1.173.567.880	82,20%	Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban tahap pertama (seharusnya Juli, namun baru diq Oktober).
2024	1.489.321.678	1.234.716.432	82,90%	Kurangnya ide kreatif dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sumber : Desa Liang Buah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, 2024

Dari data dan kajian yang dijabarkan diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Analisis analisis pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan perekonomian di Desa Liang Buah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara”.

KAJIAN LITERATUR

Menurut Hasibuan (2017) manajemen adalah ilmu dan seni mengendalikan proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen didefinisikan sebagai ilmu atau seni mengelola pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien. Sukarna, (2011)

membagi fungsi manajemen yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan) atau disingkat menjadi POAC.

Menurut Siagian (2018:32 Manajemen SDM merupakan salah satu bidang manajemen, seperti halnya Manajemen Produksi, Manajemen Biaya, atau Manajemen Perkantoran, dan sebagainya. Manajemen SDM juga dikenal sebagai Manajemen Personalia atau Manajemen Ketenagakerjaan, dengan sedikit variasi. Tenaga kerja merupakan padanan kata dari personel yang meliputi orang, peralatan, dan apparatus, yang merupakan unsur produksi manusia dengan segala aktivitasnya, dan inilah yang menjadi pusat kajian Manajemen SDM. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah cabang ilmu manajemen yang mempelajari interaksi dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi bisnis (Hatibuan, 2017). Mangkunegara (2015) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan, pengembangan, dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa teori menyimpulkan manajemen sumber daya merupakan ilmu atau seni untuk mengendalikan fungsi dan hubungan manusia (pekerja) secara efektif dan efisien dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan bisnis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alami, dan menggunakan berbagai metode alami (Moleong, 2007:17).

Jenis penelitian ini agar mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang menjadi objek atau fokus penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan suatu

permasalahan di lapangan yaitu analisis pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan perekonomian di Desa Liang Buah Kecamatan Teweh Baru yang kemudian dianalisa permasalahan yang dihadapi sesuai fakta yang terjadi saat aktivitas aktivitas berlangsung.

Populasi

Populasi adalah kumpulan lengkap item, seringkali berupa orang, benda, transaksi, atau peristiwa, yang diteliti atau digunakan oleh peneliti sebagai objek penelitian (Arikunto, 2017:145). 8 orang perangkat desa di Kecamatan Liang Buah Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara merupakan populasi dalam penelitian ini.

Sampel

Menurut Sugiyono (2017:88), Sampel merupakan contoh atau bagian dari populasi yang dianggap mencerminkan populasi tersebut, oleh karena itu informasi yang diperoleh dari sampel dapat dikatakan mewakili keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini 8 orang Aparatur Desa Liang Buah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Jumlah data yang diperoleh dan kebenaran data yang dikumpulkan memengaruhi keberhasilan suatu penelitian. Lebih lanjut, kemampuan peneliti untuk memperoleh data yang benar-benar objektif dan konsisten dengan tujuan penelitian juga sangat penting. Oleh karena itu, teknologi penambangan data memainkan peran penting dalam memastikan keakuratan data yang diperlukan untuk suatu penelitian. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi merupakan kumpulan data diperoleh dari organisasi, buku, dan internet.
2. Observasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara mengevaluasi objek penelitian guna memperoleh data primer yang diperlukan.

3. Wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi dari informan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan tertulis tentang objek penelitian.
4. Studi Pustaka merupakan data kepustakaan yang disusun dari sumber buku, jurnal dan penelitian lainnya. Studi pustaka merupakan literatur pendukung yang membantu peneliti mengumpulkan data.

Teknik Analisa Data

Analisa data sebuah penelitian merupakan tahap akhir dari proses penelitian, sebelum hasil penelitian dirangkum dalam laporan. Proses analisis dimulai dengan mengkaji semua data dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan observasi. Tahap akhir analisis adalah mengevaluasi dengan mengadakan pemeriksaan keaslian data. Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah pendekatan pemeriksaan validitas data yang menggunakan pendekatan lain. Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif, yang berarti temuan analisis didasarkan pada deskripsi fakta di lapangan untuk memperkuat argumen yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan penyiapan data, tetapi juga mencakup analisis dan interpretasi data yang terkumpul.

Analisis data digunakan dalam penelitian ini untuk mereduksi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan atau verifikasi. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan secara simultan, dengan tujuan mengkaji pengelolaan alokasi keuangan desa untuk peningkatan ekonomi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan perekonomian di Desa Liang Buah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara yang dijalankan selama ini

1. **Perencanaan**
Pengelolaan ADD telah membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi desa seperti pelatihan keterampilan dan dukungan pembiayaan usaha kecil. Dalam perencanaan, pemerintah desa melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa untuk menentukan prioritas pembangunan yang mendukung sektor ekonomi lokal. Simpulan musyawarah tersebut dituangkan dalam RKPDes yang mengarahkan penggunaan dana untuk pembangunan ekonomi kerakyatan.
2. **Penganggaran**
Dalam hal penganggaran, pemerintah desa memprioritaskan kegiatan berpengaruh langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur untuk mendukung usaha masyarakat, contohnya pasar desa dan fasilitas pertanian. ADD dialokasikan dengan proporsi yang memadai untuk sektor-sektor yang dianggap strategis, meskipun masih ada beberapa kendala dalam pengalokasian yang belum optimal.
3. **Pelaksanaan**
Pelaksanaan program ekonomi berbasis ADD dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan mendesak masyarakat. Program pelatihan keterampilan, pemberdayaan petani, dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dilaksanakan melalui keterlibatan masyarakat langsung. Namun, terkadang pelaksanaan berjalan lambat karena koordinasi yang belum maksimal antara pemerintah desa dan masyarakat
4. **Penatausahaan**
Proses penatausahaan keuangan ADD secara umum dilakukan secara efektif, meskipun pencatatan dan pelaporan kadang tertunda. Pemerintah desa menggunakan aplikasi SISKEUDES untuk mendokumentasikan alokasi dana keluar masuk.

5. **Pertanggungjawaban**
Dalam hal pertanggungjawaban, pemerintah desa sering kali melaporkan penggunaan ADD sesuai dengan tahapan yang ditetapkan, namun terdapat batasan dalam penyampaian laporan. Hal ini berpengaruh terhadap keterlambatan pencairan dana untuk tahap berikutnya. Meskipun demikian, upaya transparansi terus diupayakan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pelaporan agar penggunaan dana tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan ADD yang dihadapi

1. **Perencanaan**
Kendala utama adalah kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa. Beberapa warga tidak terlalu memahami proses perencanaan atau tidak memiliki inisiatif untuk mengajukan usulan. Akibatnya, prioritas yang ditetapkan tidak selalu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, dan banyak proyek yang kurang efektif dalam meningkatkan perekonomian desa.
2. **Penganggaran**
Penganggaran ADD mengalami kesulitan dalam hal alokasi yang adil dan merata untuk berbagai sektor, termasuk ekonomi dan infrastruktur. Terkadang, dana lebih banyak dialokasikan untuk proyek fisik, sementara pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mendapatkan perhatian. Proses penganggaran yang tidak fleksibel dan masih dipengaruhi oleh kepentingan politik juga menjadi hambatan dalam penggunaan ADD yang optimal.
3. **Pelaksanaan**
Kendala dalam pelaksanaannya meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan keterlambatan dalam pelaksanaan program. Pengawasan yang kurang ketat terhadap implementasi kegiatan menyebabkan beberapa program tidak berjalan sesuai rencana. Kurangnya

koordinasi antara perangkat desa dengan masyarakat juga menghambat efektivitas pelaksanaan program ekonomi yang berbasis ADD.

4. Penatausahaan
Penatausahaan keuangan masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan ketepatan waktu dalam pencatatan dan pelaporan. Meskipun aplikasi SISKEUDES digunakan, tidak semua perangkat desa terbiasa mengoperasikannya dengan baik, sehingga sering terjadi kesalahan dalam penginputan data keuangan dan keterlambatan dalam pelaporan. Hal ini menambah kesulitan dalam memantau penggunaan dana dengan efektif.
5. Pertanggungjawaban
Kendala utama dalam pertanggungjawaban adalah keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dan kesulitan dalam menjaga akurasi laporan yang disusun. Aparatur desa kesulitan untuk memenuhi tenggat waktu laporan karena beban kerja yang tinggi dan kurangnya pemahaman tentang prosedur administrasi yang benar. Hal ini sering menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana pada tahap berikutnya.

Upaya dalam Mengatasi Kendala Pengelolaan ADD di Desa Liang Buah untuk Meningkatkan Perekonomian

1. Perencanaan
Pemerintah desa perlu mengadakan forum diskusi atau sosialisasi lebih intensif agar masyarakat bisa lebih memahami pentingnya peran mereka dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Disamping aparat desa perlu pelatihan agar meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan analisis kebutuhan nyata masyarakat. Menurut Mardiasmo (2009), perencanaan yang efektif dalam pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat yang tinggi. Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan dapat

mengidentifikasi kebutuhan yang lebih mendalam dan menciptakan keberlanjutan dalam program-program yang dijalankan. Hal ini mengarah pada program yang lebih tepat sasaran dan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian desa.

Penelitian Sari & Yuliana (2017) menjelaskan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan mendapatkan hasil yang lebih baik ketika menggunakan dana desa. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam diskusi desa akan menghasilkan inisiatif yang lebih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Penganggaran
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah desa harus melakukan analisis lebih menyeluruh terhadap prioritas pemanfaatan dana desa. Transparansi anggaran harus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Pemerintah desa dapat menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan akses publik terhadap data anggaran dan menerapkan sistem pengawasan berbasis masyarakat. Menurut Suyanto (2015), penganggaran yang berbasis pada kebutuhan riil dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dapat menghasilkan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan keterlibatan masyarakat dalam penganggaran, diharapkan anggaran desa dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

Penelitian Fithra (2018) menggambarkan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penganggaran ADD dapat meningkatkan kualitas dana yang dialokasikan, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi desa. Pemanfaatan teknologi dalam transparansi dana terbukti mampu meningkatkan tanggung jawab dan kesadaran akan pengelolaan dana desa.

3. Pelaksanaan

Pemerintah desa perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga dan aparat desa agar pelaksanaan program lebih terstruktur dan tepat waktu. Selain itu, diperlukan pelatihan bagi aparat desa untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan teknis dalam melaksanakan proyek pembangunan yang dibiayai oleh ADD, meningkatkan realisasi ADD yang saat ini hanya mencapai 30%, beberapa langkah strategis harus segera diterapkan. Pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan sosialisasi rutin mengenai manfaat ADD dan membuka forum aspirasi agar warga lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa. Kedua, meningkatkan kemampuan aparatur desa dengan memberikan pelatihan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan sistem digital untuk mempercepat administrasi dan pelaporan. Ketiga, memperbaiki sistem pertanggungjawaban dengan membentuk tim monitoring yang mengawasi penggunaan ADD dan menerapkan sanksi bagi perangkat desa yang lalai dalam penyampaian laporan. Keempat, mendorong inovasi dalam penggunaan ADD, seperti mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM, pertanian, dan koperasi desa agar manfaat ADD lebih luas dirasakan. Terakhir, mempercepat pencairan dana dengan menyusun perencanaan anggaran yang matang dan melakukan koordinasi aktif dengan kecamatan serta dinas terkait agar tidak terjadi keterlambatan. Jika langkah-langkah ini diterapkan secara konsisten, maka realisasi ADD dapat meningkat secara signifikan dan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan desa. Menurut Rinaldi (2017), pelaksanaan yang efektif dapat tercapai jika ada koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat, serta pemantauan yang intensif. Pengawasan ketat dan peninjauan berkelanjutan akan menjamin bahwa anggaran yang dibelanjakan sesuai dengan tujuan yang

ditetapkan, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menurut Penelitian Akbar (2020), penerapan program dana desa yang terkoordinasi dengan baik antara pemerintah desa dan masyarakat dapat mengurangi pemborosan anggaran dan mempercepat tujuan pembangunan, terutama yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan juga berperan penting dalam menjaga kualitas proyek yang dijalankan.

4. Penatausahaan

Untuk mengatasi kendala dalam penatausahaan solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak pelatihan bagi perangkat desa tentang pemanfaatan aplikasi SISKEUDES. Penggunaan teknologi ini dapat meminimalisir kesalahan dalam pencatatan dan mempercepat proses pelaporan keuangan. Selain itu, pengawasan internal yang lebih ketat dan evaluasi rutin terhadap pencatatan keuangan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau penyimpangan. Menurut Mardiasmo (2009), penatausahaan keuangan yang baik tidak hanya membutuhkan sistem yang efektif tetapi juga keterampilan aparatur dalam mengelola dan melaporkan keuangan dengan benar. Penggunaan aplikasi yang tepat dan pemantauan cermat dapat membantu menciptakan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian Andriani (2017) mengungkapkan bahwa penggunaan aplikasi SISKEUDES dapat meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan di tingkat desa. Hal ini membantu mengurangi kesalahan dan mempercepat penyusunan laporan keuangan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa.

5. Pertanggungjawaban

Pemerintah desa hendaknya memperbaiki prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses verifikasi laporan. Penerapan mekanisme pengawasan yang lebih terbuka dan akuntabel, serta peningkatan kompetensi perangkat desa pada penyusunan laporan keuangan sesuai kriteria yang relevan, sangat penting untuk menjaga kualitas laporan yang disusun. Menurut Mardiasmo (2009), pertanggungjawaban keuangan yang baik memerlukan prosedur yang jelas dan transparansi yang tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan penilaian laporan keuangan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana dan menurunkan risiko penyalahgunaan anggaran.

Penelitian Iqbal (2020) pemantauan dan penilaian laporan pertanggungjawaban yang efektif dapat meningkatkan tanggung jawab dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran desa. Meningkatnya kemampuan aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan sesuai kriteria yang ditetapkan, mempercepat proses tanggung jawab dan meningkatkan transparansi dana daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan yang dapat diberikan untuk pengelolaan ADD di Desa Liang Buah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

1. Pengelolaan ADD telah dilaksanakan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa hambatan. Penggunaan ADD yang cenderung berfokus pada pembangunan fisik belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Partisipasi yang rendah dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan,

serta kurangnya transparansi informasi, turut menghambat efektivitas pengelolaan. Selain itu, koordinasi antar perangkat desa dan pemerintah daerah harus diperkuat untuk mengatasi tantangan teknologi dan administratif. Meskipun demikian, penggunaan aplikasi SISKEUDES menunjukkan adanya upaya menuju pengelolaan yang lebih efisien dan transparan, meski implementasinya belum optimal.

2. Kendala dalam pengelolaan mencakup rendahnya pemahaman aparat desa terkait tata kelola keuangan, keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurang optimalnya koordinasi dengan pemerintah daerah. Fokus pengelolaan yang masih dominan pada pembangunan fisik, minimnya inovasi dalam pemberdayaan ekonomi, serta risiko penyelewengan dana juga menjadi tantangan yang signifikan. Kendala ini membatasi efisiensi pengelolaan ADD untuk tujuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan semaksimal mungkin.
3. Upaya mengatasi kendala manajemen memerlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan, transparansi, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan. Selain itu, pengawasan dari pemerintah daerah perlu diperkuat, didukung oleh penggunaan teknologi seperti SISKEUDES untuk meningkatkan akuntabilitas. Fokus manajemen ADD juga harus mengarah pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, bantuan usaha mikro, dan pengembangan potensi lokal. Kolaborasi antara pemerintah desa dan pihak swasta merupakan langkah penting untuk mengembangkan terobosan yang mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Saran

Berikut ini saran yang dapat diberikan untuk pengelolaan ADD di Desa Liang Buah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemerintah kabupaten perlu mengadakan pelatihan rutin bagi perangkat desa untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait pengelolaan ADD, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah desa harus mempublikasikan laporan secara berkala penggunaan ADD melalui papan informasi desa, media sosial, atau forum musyawarah desa agar masyarakat dapat memantau dan memberikan masukan.
3. Memaksimalkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat lebih aktif pada saat perencanaan hingga evaluasi program yang didanai ADD.
4. Fokus pada Program Pemberdayaan Ekonomi, ADD seharusnya tidak dialokasikan untuk pembangunan saja tetapi juga diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi contohnya pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pengembangan sektor pertanian, perikanan, atau ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
5. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemantauan dan pendampingan teratur untuk memastikan pengelolaan ADD berjalan sesuai aturan dan mencegah penyimpangan.
6. Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Akademisi Desa dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau akademisi untuk mendukung inovasi dalam pengelolaan ADD, seperti pengembangan proyek ekonomi berbasis komunitas atau pelatihan berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, S.Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan

Keuangan Daerah.

Bonaldy, S., Lengkong, F. D., & Londa, V. Y. (2018) Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*

Darmiasih, dkk (2015) Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem). *jurnal Universitas Pendidikan Ganesha*

KBBI, Tim Redaksi. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Medan: Bitra Indonesia.

Afrizah, M. (2020) Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Merindu Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir. <http://repository.univ-tridinanti.ac.id/1262/6/BAB%20I.pdf>

Masihad, A. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9002/>

Kholmi, M. (2016) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *jurnal Adminsitration Publik*

Moleong, L.J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyatiningsih. (2012). *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Nasution, B.S. (2023) Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

- <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/22227/2/201801050%20-%20Benny%20Syahputra%20Nasution%20-%20Fulltext.pdf>
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Nurfaizi (2021) Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21976/1/Nurfaizi,%20160604034,%20FEBI,%20IE,%20082360298419.pdf>
- Nurlailah., Syamsul., & Rahman, A. (2020). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kabupaten Sigi. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putra, C.K., Pratiwi, R.N., & Suwondo. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
- Subranto, A. (2009). Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan ADD di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Tesis. Tidak Diterbitkan*. Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Sudjana. (2005). *Metoda Statistika*. Bandung: Cv. Tarsito
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulina, I.G.A.T., Wahyuni, M.A., & Kurniawan, P.S. (2017). *Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)*. Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1
- Sumiyati, Y., Ichi., & Umiyati, I. (2019). *Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa dan Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban Dana Desa*. Jurnal Akuntansi dan Pajak
- Thomas. (2013). *Pengelolaan ADD Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
- Tikollah, M.R., & Ngampo, M.Y.A. (2019). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. <https://ojs.unm.ac.id/JEKPEND/article/view/5064>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Profil penulis

dr. Tania Jannah, S.E., M.M., Dosen Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Muara Teweh Jl. Berlian No.55, Kec. Teweh Tengah, Kota Muara Teweh, Kalimantan Tengah 73811
Email: taniajannah1818@gmail.com